

# JIS.CO.ID

## Musrenbang Kabupaten Keerom Kodim Jayapura Dukung Kabupaten Keerom Bangkit Inovatif Dan Mandiri

Dony Numberi - PAPUA.JIS.CO.ID

Apr 24, 2024 - 17:52



Keerom – Mewakili Dandim 1701/Jayapura Pabung Letkol Inf Suwito mendampingi Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 berlangsung di Hotel

Grand Arso, Keerom, Senin (22/4/2024).

Tujuannya kegiatan Musrenbang adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan perencanaan tahunan. Musrenbang ini sejatinya aspirasi yang diakomodir mulai dari kampung, Distrik, Kabupaten hingga nanti di Provinsi.

"Saat ini pemerintah daerah masih tetap konsisten untuk meningkatkan pelayanan di semua sektor dalam rangka mewujudkan Kabupaten Keerom bangkit yang inovatif, mandiri, menghasilkan dan berkelanjutan sebagai visi Kabupaten Keerom yang menjadi cita-cita kita bersama," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Keerom dalam menjalankan program dan kegiatan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa poin indikator makro pembangunan di Kabupaten Keerom dan realita yang dihadapi saat ini.

"Dengan di gelarnya Musrenbang ini harapannya bisa menyelesaikan sejumlah hal tersebut, tentu dengan bertahap, bertingkat dan berlanjut," imbuhnya

Ditempat yang sama, Pabung Letkol Inf Suwito sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Keerom yang telah menggelar kegiatan Musrenbang ini. Kami menghimbau kepada semua warga masyarakat supaya mendukung apa yang menjadi program pemerintah daerah kedepannya.

"Dengan hasil rumusan musrenbang ini saya mengajak kita semua untuk bekerja keras memerangi kemiskinan, pengangguran, ketertinggalan, keterbelakangan menuju masyarakat keerom bangkit yang inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan," ujarnya.

Kami berharap kebijakan yang telah disusun menjadi mata rantai dari tingkat lokal, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pengawasannya. Serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan secara aktif di dalamnya, pungkasnya. (Redaksi Papua)